

KONTRIBUSI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) DALAM PEMBENTUKAN PERILAKU SISWA SMA NEGERI 19 SURABAYA

Muhammad Syaifudin

10040254046 (PPKn, FIS, UNESA) massay_fudin99@yahoo.com

Agus Satmoko

0016087208 (PPKn, FIS, UNESA) agussa_adi@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam membentuk perilaku siswa SMAN 19 Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variable, gejala atau keadaan serta penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraann terhadap pembentukan perilaku siswa di SMAN 19 Surabaya. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi PPKn dalam pembentukan perilaku gemar membaca, religius dan peduli sosial masih rendah yaitu dengan persentase antara 40,49% sampai dengan 46,47%. Sedangkan perilaku mandiri, peduli lingkungan, kreatif, rasa ingin tahu, jujur, cinta tanah air, menghargai prestasi, tanggung jawab, disiplin/kerja keras, bersahabat/komunikatif sudah cukup yaitu dengan persentase antara 47,49% sampai dengan 63,63%. Perilaku toleransi, cinta damai, semangat kebangsaan, demokrasi dalam kategori tinggi yaitu dengan persentase antara 72,50% sampai dengan 79,35%.

Kata kunci: Kontribusi, PPKn, Perilaku.

Abstract

This research have purpose to know contribution of Civics Education (PPKn) for making students' behavior of SMAN 19 Surabaya. This research is used a quantitative research approach with descriptive research, the research that is used to describe "what is" about a variable, symptoms or circumstances and descriptive study was not intended to test the hypothesis. This research aims to determine the contribution of Civics Education lesson for making students' behavior of SMAN 19 Surabaya. Conclusion of this research shows that the contribution of Civics Education to love in reading behavior, religious and care social, with the percentage between 40,49% to 46,47%. While independent behavior, care for the environment, creative, curiosity, honesty, patriotism, respect for achievement, responsibility, discipline, hard work, friends/communicative is enough that the percentage of between 47,49% to 63,63%. And behavior tolerance, love of peace, the spirit of nationalism, democracy is high category that the percentage of between 72,50% to 79,35%.

Keywords: Contribution, Civics Education, Behavior.

PENDAHULUAN

Perubahan yang terjadi di dunia, dewasa ini begitu cepat, sehingga berakibat pada tatanan yang telah ada didunia ini berubah, sedangkan disisi lain tatanan yang baru belum terbentuk. Seperti halnya dampak atau pengaruh yang diakibatkan oleh globalisasi. Hal ini berakibat pada sendi-sendi kehidupan yang selama ini diyakini kebenarannya menjadi usang. Nilai-nilai selama ini yang menjadi panutan hidup telah kehilangan otoritasnya, sehingga manusia menjadi bingung. Kebingungan itu menimbulkan berbagai krisis, terutama terjadi krisis moneter yang dampaknya tersa sekali dibidang politik sekaligus juga mempengaruhi bidang moral dan sikap perilaku manusia diberbagai belahan di dunia khususnya negara berkembang termasuk Indonesia.(Syarbaini,2006:1)

Indonesia yang merupakan negara berkembang pada waktu itu juga terkena dampak pengaruh krisis. Meskipun akibat yang ditimbulkan berdampak kepada negara dan tidak secara langsung kepada warga negara, namun berimbas pada generasi pemuda masa depan yang krisis akan sikap dan perilaku manusia. Hal ini dikarenakan para pemudalah yang akan menjadi penerus bangsa Indonesia untuk memimpin dan membawa bangsa kearah yang lebih baik. Oleh karena itu perlu adanya terobosan yang kuat untuk menyiapkan para pemuda yang berkarakter dan berperilaku baik. Salah satu terobosan yang memiliki pengaruh besar adalah melalui pendidikan, karena pendidikan memiliki fungsi mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Sehingga pendidikan sangat penting keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pada hakikatnya pendidikan merupakan upaya untuk memajukan pengetahuan, budi pekerti, dan perilaku peserta didik. Dengan demikian, maka pendidikan merupakan proses yang sangat penting dalam membentuk peserta didik baik dari sisi jasmani maupun rohaninya. Sisi jasmani diisi dengan sejumlah pengetahuan dan keterampilan sedangkan sisi rohani diisi dengan internalisasi nilai-nilai moral dan agama sehingga peserta didik menjadi cerdas, terampil, dan memiliki kepribadian yang baik.

Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara pendidikan bisa diartikan sebagai kesempurnaan hidup yakni kehidupan dan penghidupan anak-anak yang selaras dengan alamnya dan masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan secara umum sebagai daya upaya untuk mewujudkan perkembangan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (*intelekt*) dan jasmani anak, menuju ke arah masa depan yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan sikap anak yang dapat dibentuk oleh lingkungan seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara yang menyetujui teori Konvergensi, dimana perkembangan manusia itu ditentukan oleh dasar (*nature*) dan ajar (*nurture*). Anak yang baru lahir diibaratkan kertas putih yang sudah ada tulisannya, tetapi belum jelas.

Tantangan pendidikan yang ada saat ini adalah krisis jati diri kebangsaan seperti perilaku yang bertentangan dengan hakikat pendidikan tersebut. Sebut saja berbagai tindakan pemukulan, tawuran, pembunuhan, tindakan anarki yang seolah menjadi pemandangan keseharian kita. Korupsi yang semakin merajalela, terorisme, maraknya peredaran narkoba, mafia hukum, kasus-kasus kekerasan berlatar belakang SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan), luntarnya budaya malu, kesenjangan sosial yang semakin terlihat jelas antara yang kaya dan miskin, dan berbagai penyakit sosial lainnya yang sering ada di sekitar lingkungan kita.

Cara lain adalah melalui penyadaran keberagaman budaya yang dimiliki bangsa dan belajar dari pengalaman masa penjajahan, maka persatuan bangsa Indonesia menjadi tuntunan hidup bangsa Indonesia yang harus dipertahankan. Justru dengan keanekaragaman yang dimiliki, bangsa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat banyak. Prinsip persatuan Indonesia bukan berarti menghilangkan

eksistensi, identitas dan jati diri masing-masing suku bangsa. Eksistensi, identitas dan jati diri masing-masing suku bangsa tetap terpelihara dan terjaga keberadaannya karena akan selalu dijaga dan dipelihara oleh masyarakat Indonesia.

Bangsa Indonesia yang dikenal sebagai bangsa yang ramah dan santun, sekarang sudah mulai punah seiring dengan meningkatnya kasus-kasus di atas. Suka atau tidak, hal-hal tersebut di atas disebabkan dari kegagalan sistem pendidikan nasional dalam membentuk manusia Indonesia menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur sesuai tujuan pendidikan bangsa Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan di Indonesia belum berhasil “memanusiakan manusia”. Pancasila yang seharusnya menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk di dalam implementasi pendidikan nasional saat ini kedudukannya dipertanyakan.

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa lahir seiring dengan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal 17 Agustus 1945. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, ideologi dan falsafah hidup bangsa Indonesia karena merupakan penjelmaan dari nilai-nilai budaya bangsa yang terbentuk sejak zaman kerajaan. Pancasila juga merupakan sumber dari sumber hukum di Indonesia. Berbagai aturan hukum yang dibuat harus berlandaskan kepada nilai dan jiwa Pancasila yaitu cerminan dari nilai-nilai Pancasila.

Nilai dan jiwa Pancasila merupakan sebuah pandangan hidup bangsa Indonesia yang terbuka dan bersifat dinamis. Sifat keterbukaan Pancasila dapat dilihat pada muatan Pancasila yang merupakan perpaduan antara nilai-nilai ke-Indonesiaan yang beranekaragam dan nilai-nilai yang bersifat universal. Nilai universal tersebut adalah Pancasila yang dapat dilihat pada semangat ketuhanan (sila pertama); kemanusiaan, keadilan, dan keadaban (sila kedua); dan keIndonesiaan (sila ketiga) dan semangat gotong-royong (sila keempat), dan keadilan sosial (sila kelima).

Nilai Pancasila saat ini seolah-olah terkubur oleh peradaban bangsa yang serba modern dan instan. Nilai-nilai Pancasila menjadi sesuatu yang tidak terlalu menarik untuk digali atau dikembangkan khususnya di kalangan generasi muda. Bahkan, jangankan menggali nilai-nilainya, menyebutkan urutan sila-sila Pancasila saja ada yang sudah lupa. Oleh karena itu perlu adanya proses Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai pedoman sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan tindakan untuk merubah bangsa yang unggul dan memiliki warga negara yang berkarakter baik dan sopan santun sesuai sifat bangsa Indonesia pada zaman dulu.

Pancasila sekarang seakan dikesampingkan dalam pendidikan nasional dan di tengah bangsa Indonesia yang

mengalami krisis identitas kebangsaan. Oleh karena itu perlu adanya desakan untuk menjadikan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai pedoman materi dan perubahan perilaku siswa di sekolah. Tujuannya untuk mengembalikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai roh pendidikan dan roh kehidupan berbangsa dan bernegara.

Banyaknya kasus Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), dan penyalahgunaan hukum oleh penguasa Orde Baru di kalangan pejabat pemerintahan adalah salah satu dari banyak bukti penyalahgunaan Pancasila. Dampak langsung dari manipulasi atas dasar negara Pancasila adalah sikap acuh tak acuh dan tak mau tahu atas Pancasila ketika rezim otoriter Orde Baru tumbang. Sehingga sangat sulit lagi jika bangsa ini akan membentuk karakter pemuda melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila secara langsung. Oleh karena itu perlu adanya pendewasaan nilai-nilai Pancasila melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah yang membentuk karakter baik mulai sejak dini serta pada masa remaja yang sangat identik dengan penyimpangan sosial.

Trauma generasi muda terhadap pemerintahan orde baru, telah melahirkan generasi muda era reformasi yang cenderung apatis dan tidak peduli terhadap nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Sementara disisi lain, era globalisasi beserta dampaknya telah merubah ancaman terhadap eksistensi bangsa Indonesia. Ancaman bagi bangsa Indonesia, tidak lagi diwujudkan dalam bentuk ancaman secara fisik seperti zaman penjajahan, melainkan ancaman tampil dalam wujud dan bentuk ancaman yang lebih kompleks dan mencakup seluruh dimensi kehidupan. Oleh karena itu, sangat perlu untuk disikapi dengan hati-hati oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia terutama dengan menyaring budaya yang baru masuk dan belum dikenal.

Saat ini Indonesia berada ditengah-tengah era reformasi, tetapi reformasi harus tetap diletakkan dalam rangka nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dasar negara dan ideology bangsa, sebab tanpa adanya suatu dasar nilai yang jelas dan tujuan bangsa maka reformasi akan mengarah pada suatu keadaan negara yang tidak jelas pula, seperti tindakan anarkis para demonstran, tindakan brutal preman serta pada akhirnya menuju pada kehancuran bangsa dan negara Indonesia. Dari sinilah negara harus mulai berfikir bagaimana mengembalikan karakter bangsa Indonesia yang terkenal baik dan santun menurut bangsa-bangsa di seluruh dunia, serta bagaimana implementasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam membentuk perilaku baik generasi penerus bangsa.

Pada era reformasi seperti saat ini, perkembangan situasi nasional cukup memprihatinkan dengan banyaknya permasalahan yang muncul secara bergantian

di seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam kehidupan bermasyarakat, terjadinya perubahan sikap dan tingkah laku merupakan cerminan menipisnya nilai terhadap pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Dampak demokratisasi yang tidak terkendali dan dengan pemahaman nilai-nilai Pancasila yang lemah telah memunculkan sikap individualis. Sangat jauh berbeda dengan nilai-nilai Pancasila yang lebih mementingkan keseimbangan, kerjasama, saling menghormati, kesamaan, dan kesederajatan dalam hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan sehari-hari.

Banyaknya dampak reformasi yang kita hadapi saat ini, perlu disikapi oleh segenap komponen bangsa yaitu pemerintah dan masyarakat melalui pemahaman yang benar, utuh dan menyeluruh dalam konteks semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Semangat tersebut merupakan kata kunci dari implementasi nilai-nilai luhur Pancasila yang harus terus ditumbuhkan dan dikembangkan oleh generasi penerus bangsa. Seluruh komponen bangsa harus mampu menyikapi berbagai permasalahan yang ada. Seluruh generasi penerus harus aktif untuk menciptakan, membina, mengembangkan dan memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa yang sering menghadapi potensi perpecahan. Generasi penerus harus mampu mengaktualisasikan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam rangka cerminan terhadap nilai-nilai Pancasila dalam rangka pembentukan perilaku yang baik.

Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila akan selalu relevan selama negara ini berdiri. Sebagai negara yang terdiri dari suku bangsa yang beranekaragam, hal ini dikarenakan bahwa Pancasila dinilai sebagai ideologi terbaik bagi bangsa Indonesia. Pancasila adalah yang menyebabkan anak-anak bangsa mau bersatu membentuk NKRI. Dengan Pancasila, bangsa Indonesia menjadikan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar dalam membentuk sosok manusia yang adil dan beradab, sebagai sumber inspirasi untuk bersatu, menjadi landasan untuk musyawarah mufakat, dan mewujudkan keadilan sosial. Tetapi bukan berarti nilai-nilai Pancasila harus berdiri tegak, tetapi nilai-nilai Pancasila juga perlu dikritisi dan digali untuk dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman yang ada.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat dimaknai sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari pada peserta didik baik sebagai individu, maupun sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada hakikatnya Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan memiliki kontribusi penting untuk menunjang tujuan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berkaitan dan berjalan seiring dengan perjalanan pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan bagian integral dari ide, instrumentasi, dan praksis kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia (Winataputra,2008:76)

Ditegaskan pula oleh Zamroni dalam International Conference on Chemistry Education (ICCE) bahwa :

“Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berupaya mengantarkan warganegara Indonesia menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air; menjadi warga negara demokratis yang berkeadaban; yang memiliki daya saing: berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. PPKn adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat”.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat dilakukan melalui beberapa cara agar dapat merasuk kedalam jiwa dan raga para pemuda penerus bangsa Indonesia, antara lain: pertama, dengan mengintegrasikannya ke dalam semua mata pelajaran tak terkecuali pendidikan agama karena nilai-nilai Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sejalan dengan nilai-nilai ajaran agama walaupun derajat nilai agama derajatnya pasti paling tinggi karena nilai-nilai ajaran agama (Islam) bersifat wahyu dari Allah SWT sedangkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan hanyalah hasil pemikiran tokoh-tokoh bangsa. Namun yang sangat relevan adalah melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di sekolah dalam rangka membentuk perilaku siswa.

Cara yang kedua adalah melalui kegiatan upacara bendera, ekstrakurikuler, kegiatan OSIS, dan pembiasaan. Dalam artian Pancasila bukan hanya dibacakan saat upacara bendera hari senin saja, tetapi yang paling penting adalah bagaimana peserta didik dapat menggali nilai-nilai Pancasila tersebut dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari sinilah peserta didik dapat belajar secara langsung pengenalan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah untuk diterapkan di kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Cara yang ketiga dengan membawa peserta didik ke dalam dunia nyata. Pada saat melihat kehidupan nyata tersebut, mungkin saja peserta didik melihat ada kesenjangan antara Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan secara tulisan dengan pengamalannya di masyarakat. Sehingga siswa dapat mengamalkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan disetiap aktifitas atau kegiatan sehari-hari siswa ketika hidup di tengah-tengah masyarakatnya.

Cara yang keempat dapat ditempuh dengan merancang program aksi nyata peserta didik melalui kegiatan bakti sosial, ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan, kegiatan pemerintahan, mengunjungi tempat-tempat bersejarah, dan sebagainya. Kegiatan tersebut merupakan sarana bagi siswa untuk mengimplementasikan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dipelajari di sekolah. Dengan kegiatan tersebut, peserta didik akan merasakan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan itu perlu untuk dilaksanakan. Hal ini dilakukan dan dipertahankan karena dapat diambil sikap toleransi, keberadaban, persatuan dan persatuan, musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan, dan keadilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, organisasi politik, organisasi masyarakat, dosen dan guru merupakan pelaksana-pelaksana upaya implementasi nilai-nilai Pancasila yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dengan pembekalan yang memadai terkait nilai-nilai Pancasila yang merupakan komponen bangsa tersebut memainkan peran sebagai agen perubahan. Perubahan dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat hingga lingkungan kerja. Pendidikan formal, informal maupun non formal juga sangat berperan dalam penerapan secara langsung. Pengenalan yang dimulai dari lingkungan keluarga hingga lingkungan pendidikan yang merupakan sarana yang efektif dan efisien untuk menanamkan pemahaman atas nilai-nilai yang dikandung Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang 27-29 Mei 2011 dengan 12.056 responden lewat wawancara/tatap muka kepada pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, pengusaha, tokoh masyarakat, TNI, Polri, dan lainnya yang ada di 181 kabupaten/kota di 33 provinsi di Indonesia menyebutkan bahwa orang yang paling tepat untuk melakukan edukasi dan sosialisasi Pancasila, 43 persen responden menyatakan para guru dan dosen, 28 persen tokoh masyarakat dan pemuka agama, 20 persen badan khusus pemerintah seperti BP 7, dan 3 persen responden memilih elite politik. Oleh karena itu, Pendidikanlah yang memiliki peran besar untuk mengubah perilaku generasi penerus bangsa yang

berkarakter baik adalah melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah.

Sekolah Menengah Atas (SMA) di Surabaya yang memiliki mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang baik adalah SMA yang dapat membentuk perilaku siswanya menjadi baik pula. Tidak hanya itu, sekolah juga dipandang masyarakat sekitar lebih jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain di sekitarnya. Salah satu SMA yang dimaksud adalah SMAN 19 Surabaya. Mengapa? Hal ini berdasarkan observasi pada saat PPL II di SMA tersebut pada tanggal 15 Juli sampai 13 September 2013, perbedaan sikap dan perilaku antara siswa kelas X (sepuluh) dan kelas XI (sebelas) sangatlah berbeda. Sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh kelas XI lebih baik dan sopan dengan guru dan karyawan sekolah apabila dibandingkan dengan siswa kelas X. Meskipun Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan melalui kurikulum KTSP pada kelas XI sudah ditiadakan dalam mata pelajaran PPKn namun Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kembali lagi pada kelas X melalui kurikulum 2013.

Berdasarkan observasi selanjutnya, ternyata tidak hanya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dapat membentuk perilaku siswa. Mata pelajaran Pendidikan Agama juga memiliki pengaruh terhadap pembentukan perilaku siswa, begitupun juga mata pelajaran lain yang terintegrasi dengan pendidikan moral atau pendidikan budi pekerti. Sehingga dapat dikatakan bahwa dua atau lebih mata pelajaran tersebut yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama dan mata pelajaran lainnya memiliki pengaruh terhadap pembentukan perilaku siswadi SMAN 19 Surabaya. Namun pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang memberi kontribusi dalam pembentukan perilaku siswa.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di lingkungan sekolah sangatlah penting sebagai pedoman perilaku siswa yang berkarakter baik demi mewujudkan bangsa Indonesia yang Pancasila. Atinya setiap perilaku yang ditunjukkan siswa sesuai dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Serta akan semakin terasa penting apabila ketiga aktor yaitu pemerintah (*state*), swasta (*private sector*) dan masyarakat (*civil society*) dapat bersinergi untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan menjadi waga negara Indonesia yang baik pula. Ini berarti Indonesia dengan jiwa karakter yang berperilaku baik akan kembali ditengah-tengah kehidupan sekolah, bermasyarakat, bangsa, dan negara.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa kontribusi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam membentuk perilaku

siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 19 Surabaya?. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pendidikan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Sekolah Menengah Atas Negeri 19 Surabaya dalam membentuk perilaku siswa.

Pendidikan sangatlah penting bagi manusia di dunia ini tanpa terkecuali. Hal ini disebabkan melalui pendidikanlah manusia dapat belajar dari ilmu pengetahuan, sikap, dan tindakan yang baik untuk dilakukan. Hal yang paling berperan dalam pendidikan adalah pemerintah, dan dinas pendidikan dan kebudayaan yang memiliki wewenang untuk menentukan arah pendidikan di Indonesia ini mau dibawa kemana. Tidak hanya itu, sekolah dan guru juga memiliki peran penting di lingkungan pendidikan bagi kemajuan bangsa melalui pengajaran dan pendidikan serta penanaman karakter yang baik.

Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang 27-29 Mei 2011 dengan 12.056 responden lewat mewawancarai/tatap muka kepada pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, pengusaha, tokoh masyarakat, TNI, Polri, dan lainnya yang di 181 kabupaten/kota di 33 provinsi. Pada survei itu diajukan pertanyaan "Bagaimana cara yang tepat untuk memahami Pancasila?" Hasilnya, 30 persen melalui pendidikan, 19 persen melalui teladan dari pejabat negara dan pemerintah, 14 persen melalui teladan dari tokoh masyarakat, 12 persen melalui media massa, dan 10 persen melalui ceramah keagamaan.

Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang paling tepat melakukan edukasi dan sosialisasi Pancasila adalah 43 persen responden menyatakan para guru dan dosen, 28 persen tokoh masyarakat dan pemuka agama, 20 persen badan khusus pemerintah seperti BP 7, dan 3 persen responden memilih elite politik. Itu artinya guru dan dosen memiliki peran yang besar dan andil yang tinggi dalam proses pendidikan dan sosialisasi Pancasila. Dari sinilah yaitu siswa yang berkarakter sebagai generasi penerus bangsa akan bisa dibentuk dengan perilaku yang baik dan berkarakter.

Pancasila adalah lima dasar yang secara harfiah "panca" artinya lima, sedangkan "sila" adalah asas atau dasar. Istilah "sila" juga dapat diartikan sebagai aturan yang melatarbelakangi perilaku seseorang atau bangsa; kelakuan atau perbuatan yang menurut adab (sopan santu); akhlak dan moral. (Marsudi, 2001: 3).

Menurut riset McKinsey Global Institute Analysis tahun 2010 yang merupakan lembaga riset terkenal di Amerika, Indonesia adalah negara yang sangat menjanjikan pada tahun 2025-2030 dan akan menjadi negara dengan ekonomi nomor 6-7 di dunia. Usia produktif penduduk Indonesia akan berada di puncak-

puncaknya pada tahun itu. Jika siswa sekarang berusia sekitar 17 tahun maka tahun 2030 nanti berusia sekitar 34 tahun, maka siswalah yang nanti yang memimpin Indonesia ini sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu perilaku siswa haruslah memiliki karakter yang baik sesuai ideologi bangsa yaitu Pancasila.

Hal senada dikemukakan Kaelan yaitu perlu adanya revitalisasi nilai-nilai Pancasila yang harus meliputi tiga dimensi yakni sistem nilai, sistem sosial, dan wujud fisik baik dalam kebudayaan maupun kehidupan masyarakat. Wreksosuhardjo juga menjelaskan bahwa Pancasila merupakan suatu filsafat yang fundamen pikiran, jiwa dan hasrat yang sedalam-dalamnya yang di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi.

Tidak pernah ada suatu bangsa hidup terpisah dari akar tradisinya sebagaimana tidak ada pula suatu bangsa yang hidup tanpa pengaruh dari luar. Bangsa yang besar adalah bangsa yang hidup dengan kelenturan budayanya untuk mengadaptasi unsur-unsur luar yang dianggap baik dan dapat memperkaya nilai-nilai lokal yang dimiliki. Ketidakmampuan beradaptasi dengan budaya luar acap kali menempatkan bangsa tersebut ke dalam kisaran kekeringan atau kekerdilan identitas. Namun demikian, terlalu terobsesi dengan budaya luar dan pada saat yang sama mencampakkan tradisi dan nilai-nilai baik lokal berpeluang menjadikan bangsa tersebut kehilangan identitas. Akibatnya bangsa tersebut tidak pernah menjadi dirinya sendiri. (Rozak, 2008: 261)

Berdasarkan ungkapan Ubaedillah dan Rozak maka perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila perlu tetap dipertahankan meskipun adanya budaya luar yang mengancam. Hal kecil yang dapat dilakukan Indonesia adalah menyaring segala aspek budaya yang masuk ke dalam kehidupan bangsa Indonesia dengan cara mengambil budaya yang sesuai dengan dasar dan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Pada tanggal 18 Agustus 1945 diadakan sidang oleh 9 anggota ditetapkan oleh PPKI yang menghasilkan Pancasila dengan rumusan sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Dalam perkembangannya, rumusan Pancasila di harapkan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Namun yang terjadi selama ini tidaklah masyarakat melaksanakan

sesuai dengan harapan para pendiri bangsa terdahulu. Lebih-lebih banyak nilai-nilai Pancasila yang ditinggalkan karena pengaruh globalisasi yang menggila dan tidak lagi dapat dibendung oleh bangsa Indonesia. Maka disinilah tugas dan peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai pedoman perilaku generasi penerus bangsa yaitu siswa.

Sedangkan Kewarganegaraan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan adalah segala ikhwal yang berhubungan dengan negara. Namun secara terperinci, pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu Kewarganegaraan dalam arti yuridis-sosiologis dan Kewarganegaraan dalam arti formil-materil.

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dalam kurikulum KTSP merumuskan tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. (BSNP, 2006: 78)

Djahiri juga mengemukakan bahwa melalui PKn siswa diharapkan:

1. Memahami dan menguasai secara nalar konsep dan norma Pancasila sebagai falsafah, dasar ideologi, dan pandangan hidup negara RI.
2. Mengetahui konstitusi (UUD NRI 1945) dan hukum yang berlaku dalam negara RI.
3. Menghayati dan meyakini tatanan dalam moral yang termuat dalam butir di atas.
4. Mengamalkan dan membakukan hal-hal di atas sebagai sikap perilaku diri dan kehidupannya dengan penuh keyakinan dan nalar. (Djahiri, 1995:10)

Rencana Pendidikan (Kurikulum 1964), yang kemudian ditimpali dengan Penetapan Presiden no. 19/1965. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini bahkan ditafsirkan menurut Manifesto Politik dan USDEK (Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia). Serta ditafsirkan pula

menurut ciri-ciri manusia sosialis Indonesia, dimana yang keduanya merupakan doktrin politik Orde Lama yang terkenal itu. Di bidang pendidikan, doktrin ini ditambah dengan "Pancawardana" sebagai sub pokok bahasan. Dalam Penpres no. 19/1965 itu bahkan disebutkan bahwa manusia Indonesia Baru yang dibentuk melalui sistem Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus berjiwa "nasakom", singkatan dari akronim "nasionalis, agama dan komunis", suatu jargon yang terdengar nyaring pada jaman itu. (Jasin, 1987:56)

Kata "Pancasila" sudah terdapat dalam Rencana Pendidikan tahun 1964 tadi, namun karena secara aksiologis penyusunan kurikulum belum sempurna seperti saat ini, maka Pancasila hanya disinggung sepintas lalu sebagai dasar dari sistem pendidikan, dengan menyebutkan bahwa *dasar pendidikan nasional adalah Pancasila dan Manipol Usdek dengan segala konsekwensi dan implikasinya bagi pendidikan dan kurikulum Sekolah Dasar pada saat itu.*

Bersamaan dengan lahirnya Orde Baru pasca 1965, maka dalam kurikulum 1968, mulailah tercetak secara eksplisit kata Pancasila dalam sistem kurikulum pendidikan dengan disebutkannya bahwa Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila terdiri dari mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Kewargaan Negara, Pendidikan Bahasa Indonesia dan Pendidikan Olahraga.

Adanya perubahan-perubahan politik di tanah air, maka tujuan pendidikan nasional dalam sistem pembentukan manusia Indonesia yang dicita-citakan menjadi terombang-ambing dan tidak kunjung mantap yang disebabkan kurang kokohnya ideologi Pancasila dalam pendidikan nasional. Pada Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1973, memang telah dicanangkan agar pembentukan mental dan moral Pancasila dimasukkan kedalam kurikulum dan menjadi bagian integral dari pendidikan nasional. Dengan amanat konstitusi ini, karena GBHN adalah produk legislatif oleh MPR, maka dengan sertamerta dimulailah masa kejayaan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam sistem kurikulum pendidikan Indonesia.

Datangnya era Ekaprasetya Pancakarsa pada tahun 1978 atau yang terkenal dengan P-4, yakni Pedoman Penghayatan dan Pengmalan Pancasila, dan dibentuknya BP-7, sebuah lembaga negara yang mengelola penataran P-4 tersebut. Kurikulum 1975, yang telah mencantumkan Pancasila seperti telah diawali pada kurikulum 1968, segera disesuaikan dengan konsep Ekaprasetya Pancakarsa yang dicanangkan dalam tahun 1978 tersebut. Perombakan penting segera terjadi terhadap Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Mata pelajaran itu menjadi lebih kokoh berdiri sendiri dalam struktur program kurikulum dalam semua jenjang sekolah.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu telah luar biasa disibukkannya dalam manajemen PMP. Mulai dari seleksi buku pelajaran yang berduyun-duyun mendatanginya serta para pengarang dan penerbit, penataran guru PMP di seluruh pelosok tanah air serta mencetak bahan2nya, simulasi untuk menemukan metodologi yang pas, teknik evaluasi dan lain-lain lagi. Entah berapa banyak uang yang terpakai untuk ini. Disamping penataran P-4 sendiri oleh BP-7 yang diberlakukan untuk seluruh Badankrasi, aparaturnegara, politisi dan lapisan masyarakat tertentu seperti perkumpulan-perkumpulan profesi dan sebagainya.

Kurikulum 1994, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mengalami perubahan, karena terlalu dipaksakan untuk berdiri sendiri dalam kurikulum 1975 maka Pendidikan Moral Pancasila tadi direduksi posisinya. Dari mata pelajaran yang berdiri sendiri, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan lalu digabung dalam mata pelajaran PPKn, singkatan dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diintegrasikan sebagai pengetahuan untuk mempertebal semangat dan jiwa kebangsaan melalui ilmu kewarganegaraan.

Perkembangan terkini, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang sudah mengalami gelombang pasang surut dalam sistem kurikulum kita, bahkan "lenyap" dari "*curriculum exposure*". Datangnya era reformasi pada tahun 1998 disusul dengan dibubarkannya BP-7 dan P-4, mempercepat hilangnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari struktur kurikulum 1994. Sedangkan Kurikulum 2004 yang disebut sebagai Kurikulum Berbasis Kompetensi atau K.B.K telah menghilangkan kata "Pancasila" dari PPKn, tinggal menjadi PKn atau Pendidikan Kewarganegaraan, tanpa menyebut Pancasila lagi. Begitu pula dengan kurikulum KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) tahun 2006, yang dalam struktur programnya, tidak ada lagi kata Pancasila.

Sigit (2008: 76) menjelaskan bahwa apabila dalam kurikulum 1994 dahulu Pancasila masih dapat "kapling" dalam mata pelajaran PPKn, maka dalam kurikulum KBK tahun 2004 yang kemudian disusul dengan KTSP yang baru dilansir tahun 2006 yang lalu, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tidak lagi disebut. Alasan tidak disebutnya lagi kata Pancasila mungkin untuk menjadi warganegara yang baik cukup dengan mengajarkan PKn, dimana Pancasila sudah implisit ada disitu. Hal serupa sangat sesuai dengan tulisan John Dewey, (1859-1952), seorang filosof Amerika dalam bukunya "Democracy And Education, an Introduction of the Philosophy of Education" tahun 1915, yang mengambil contoh bagaimana *leadership* dari pemimpin-

pemimpin Prusia telah membentuk warganegara Jerman yang begitu tangguh nasionalismenya.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia dan suku bangsa untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Kurikulum Berbasis Kompetensi, 2004). Meskipun tanpa kata “Pancasila” pengertian berdasar Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004 masih mengamankan karakter yang sesuai dengan sifat Pancasila. Sedangkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah bagian dari Pendidikan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), dimana mulai diberlakukannya kurikulum 2004 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tidak lagi digunakan dalam Pendidikan Kewarganegaraan, namun materi tentang Pancasila masih diterapkan di pelajaran tersebut.

Pendidikan Kewarganegaraan mengalami perkembangan sejarah yang sangat panjang, yang dimulai dari *Civic Education*, Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, sampai yang terakhir pada Kurikulum 2004 dan KTSP 2006 berubah namanya menjadi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Dan pada tahun 2013 melalui Kurikulum 2013 kata “Pancasila” dalam pelajaran PKn diikutkan lagi, sehingga menjadi PPKn. Disinilah letak pentingnya makna Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Pendidikan Kewarganegaraan.

Teori behaviorisme Skinner adalah Pengkondisian operan (*kondisioning operan*). Pengkondisian operan adalah sebetuk pembelajaran dimana konsekuensi-konsekuensi dari perilaku menghasilkan perubahan dalam probabilitas perilaku itu akan diulangi. Ada 6 asumsi yang membentuk landasan untuk kondisioning operan (Gredler, 2007:122). Asumsi-asumsi itu adalah sebagai berikut:

1. Belajar itu adalah tingkah laku.
2. Perubahan tingkah-laku (belajar) secara fungsional berkaitan dengan adanya perubahan dalam kejadian-kejadian di lingkungan kondisi-kondisi lingkungan.
3. Hubungan yang ber hukum antara tingkah-laku dan lingkungan hanya dapat di tentukan kalau sifat-sifat tingkah-laku dan kondisi eksperimennya di definisikan menurut fisiknya dan di observasi di bawah kondisi-kondisi yang di control secara seksama.
4. Data dari studi eksperimental tingkah-laku merupakan satu-satunya sumber informasi yang dapat di terima tentang penyebab terjadinya tingkah laku.

5. Tingkah-laku organisme secara individual merupakan sumber data yang cocok.
6. Dinamika interaksi organisme dengan lingkungan itu sama untuk semua jenis makhluk hidup.

Pusat Kurikulum Pendidikan Nasional (Diknas) menjelaskan bahwasanya perilaku berkarakter dapat dibedakan menjadi 18 perilaku, yaitu : religus, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggun jawab (Afrizon, 2008:7).

METODE

Titik fokus dalam penelitian ini adalah kontribusi apa yang dapat diberikan oleh mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam membentuk perilaku siswa. Alasan pemelihan penelitian ini adalah ingin mengungkap seberapa besar kontribusi mata pelajaran PPKn dalam membentuk perilaku siswa di SMAN 19 Surabaya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif karena bertujuan untuk mengangkat fakta, keadaan dan fenomena yang terjadi dan menyajikan data apa adanya. Alasan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi mata pelajaran PPKn dalam membentuk perilaku siswa di SMAN 19 Surabaya.

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Negeri 19 Surabaya. Dipilihnya lokasi penelitian ini karena perilaku siswa di SMA tersebut mencerminkan perilaku baik sesuai Pendidikan Pancasila dan Kewarganegara yang yang dapat dijadikan pedoman (Berdasarkan Praktek Pengalaman Lapangan II:2013). Oleh karena itu penelitian ini bertujuan ingin membuktikan dengan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah tersebut.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMAN 19 Surabaya, yang dalam hal ini jumlah dari siswa kelas XI SMAN 19 Surabaya berjumlah 364 siswa. Sampel pada penelitian ini berjumlah 184 orang yang dihitung menggunakan rumus dari Slovin. Teknik pengambilan sampel menggunakan *cluster random sampling*.

Variabel dalam penelitian ini adalah kontribusi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam pembentukan perilaku siswa di SMAN 19 Surabaya. Definisi operasional variabel pada penelitian ini ialah Kontribusi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam pembentukan perilaku

siswa di SMAN 19 Surabaya adalah peran atau sumbangan yang diberikan oleh mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam membentuk 18 perilaku berkarakter siswa di SMAN 19 Surabaya. Adapun 18 perilaku yang dimaksud adalah *religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggun jawab.*

Teknik pengumpulan data ini terdiri dari angket, observasi dan wawancara. Menurut Nasution (2009: 128) pengertian angket atau questionnaire adalah daftar pertanyaan yang didistribusikan melalui pos untuk diisi dan dikembalikan atau dapat juga dijawab di bawah pengawasan peneliti. Responden ditentukan berdasarkan teknik sampling. Angket digunakan untuk mendapatkan keterangan dari sampel atau sumber yang beraneka ragam yang lokasinya sering tersebar daerah yang luas.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket tertutup, yaitu salah satu jenis angket dimana item pertanyaan pada angket berbentuk pilihan / isian tanda yang nantinya responden diharapkan bisa mengisi angket sesuai dengan pertanyaan atau petunjuk yang diberikan, sehingga diharapkan nantinya data yang diperoleh bisa lebih terjamin keorsinilannya. Selain itu angket digunakan untuk mencari data yang berhubungan dengan seberapa besar kontribusi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam membentuk perilaku siswa kelas XI di SMAN 19 Surabaya.

Adapun Observasi pada penelitian ini hanya sebatas gejala yang di hadi sebelumnya sebagai tolak ukur setelah penelitian. Observasi dilakukan sebelum penelitian yaitu pada saat PPL II dilaksanakan yaitu pada tanggal 15 Juli sampai 13 September 2013. Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui kontribusi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam membentuk perilaku SMA Negeri 19 Surabaya.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif dengan persentase melalui tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian deskriptif. Menggunakan rumus:

$$P = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Keterangan :
 P = Skor Persentase
 n = Skor Jawaban Responden
 N = Skor Maksimal

Penggunaan teknik persentase partisipasi untuk menunjukkan seberapa tinggi tingkat Kontribusi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam Pembentukan Perilaku Siswa SMA Negeri 19

Surabaya. Pemilihan teknik tersebut disesuaikan dengan jenis penelitian untuk mengungkap seberapa besar persentase hasil penelitian. Teknik ini digunakan untuk menganalisis rumusan masalah.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penggunaan teknik analisis data ini adalah: (1) Membuat tabulasi jawaban responden berdasarkan pertanyaan dari angket. (2) Tabel jawaban responden dibagi sesuai dengan indicator. (3) Tabel dari jawaban responden dihitung menggunakan perhitungan persentase keseluruhan. (4) Dari data yang disajikan, akan dianalisis menggunakan deskriptif kuantitatif dengan mempersentasekan hasil jawaban dari responden.

Setelah penentuan skor atas jawaban dari angket responden, maka penentuan kriteria penilaiannya sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Penilaian (Sugiyono, 2013:228)

No	Range	Kualitas
1	10% - 28%	Sangat Rendah
2	29% - 46%	Rendah
3	47% - 64%	Cukup
4	65% - 82%	Tinggi
5	83% - 100%	Sangat Tinggi

Kriteria penelitian ini sebagai pengkategorian dari hasil skor yang akan digunakan sebagai tolak ukur dalam hasil penelitian tentang masalah yang diteliti. Dengan menggunakan teknik ini, dimana hasilnya berupa skor, maka akan dapat menggambarkan keadaan sampel dan selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sehingga dapat menjelaskan keadaan yang sebenarnya dari suatu populasi. Tindakan mengambil kesimpulan adalah sebagai cara untuk memperoleh kepastian akan kebenaran dari suatu penelitian yang berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data. Dengan menarik kesimpulan, berarti akan memberi jawaban tentang benar atau tidaknya dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum lokasi penelitian

SMA Negeri (SMAN) 19 Surabaya, merupakan salah satu Sekolah Menengah Atas Negeri yang ada di Provinsi Jawa Timur, Indonesia dan merupakan salah satu sekolah terbesar di Surabaya. Sekolah ini beralamatkan di Jl. Kedung cowek 390 Surabaya.

Sama dengan SMA pada umumnya di Indonesia masa pendidikan sekolah di SMAN 19 Surabaya ditempuh dalam waktu tiga tahun pelajaran, mulai dari Kelas X sampai Kelas XII. Berikut ini adalah keadaan populasi dan sampel penelitian mengenai kontribusi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam membentuk perilaku siswa SMAN 19 Surabaya :

Kontribusi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam Pembentukan Perilaku Siswa SMA Negeri 19 Surabaya.

Berdasarkan hasil data dan kriteria penilaian penilaian persentase tersebut, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat perilaku siswa SMAN 19 Surabaya memiliki hasil sebagai berikut :

Tabel 3. Hasil Penilaian Perilaku Berdasarkan Kriteria

No.	Kriteria	Perilaku	Persentase		
1	Sangat Rendah	-	-		
2	Rendah	GEMAR MEMBACA	40,49 %		
		RELIGIUS	46,15 %		
		PEDULI SOSIAL	46,47 %		
3	Cukup	MANDIRI	47,49 %		
		PEDULI LINGKUNGAN	48,74 %		
		KREATIF	51,52 %		
		RASA INGIN TAHU	55,00 %		
		JUJUR	55,83 %		
		CINTA TANAH AIR	58,69 %		
		MENGHARGAI PRESTASI	59,85 %		
		TANGGUNG JAWAB	60,55 %		
		DISIPLIN	61,27 %		
		KERJA KERAS	62,33 %		
		BERSAHABAT/KOMUNIKATIF	63,63 %		
		4	Tinggi	TOLERANSI	72,50 %
				CINTA DAMAI	74,36 %
SEMANGAT KEBANGSAAN	76,63 %				
DEMOKRASI	79,35 %				
5	Sangat Tinggi	-	-		

Tabel diatas merupakan distribusi jawaban yang diperoleh dari responden dengan item pertanyaan dalam bentuk angket dengan tujuan untuk mengetahui tingkat Kontribusi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam Pembentukan Perilaku Siswa SMA Negeri 19 Surabaya.

PEMBAHASAN

Kontribusi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam Pembentukan Perilaku Siswa SMA Negeri 19 Surabaya.

Berdasarkan hasil penelitian pengembangan dengan wawancara dengan responden 20 siswa yang tersebar di 10 kelas pada kelas XI, maka ada beberapa dan pengolahan data bahwa ada beberapa perbedaan dari hasil penelitian. Untuk lebih detailnya, berikut adalah besar kontribusi PPKn terhadap masing masing Perilaku, yaitu:

1. Perilaku religius

Hasil dari wawancara sebagai bahan pelengkap penelitian bahwasanya perilaku religius siswa sangat dipengaruhi mata pelajaran Pendidikan Agama. Rata-rata informan mengatakan bahwa perilaku religius siswa dihasilkan dari pengajaran Pendidikan Agama disekolah. Seperti kata salah satu informan: "Perilaku religius saya, saya dapat banyak dari mata pelajaran Pendidikan Agama Pak". Selanjutnya ditanya alasan apa yang melatarbelakangi pernyataan informan tersebut. Informan mengatakan bahwa sikap yang dimilikinya lebih menunjukkan sikap yang ditanyakan sebagai indikator dari perilaku religius.

Berdasarkan hasil wawancara berarti kontribusi mata pelajaran PPKn dalam membentuk perilaku religius siswa SMA Negeri 19 Surabaya tergolong rendah dan sesuai dengan hasil perhitungan angket dalam persentase sebesar 40,49%. Namun bukan berarti PPKn tidak memiliki kontribusi pada perilaku tersebut, hanya saja kontribusi yang diberikan tidak sebesar mata pelajaran Pendidikan Agama.

2. Perilaku jujur

Hasil dari wawancara sebagai bahan pelengkap penelitian bahwasanya perilaku jujur siswa sedikit banyak dipengaruhi oleh mata pelajaran PPKn. Rata-rata informan mengatakan bahwa perilaku jujur siswa merupakan hasil dari pengajaran materi PPKn. Kata informan yang bernama Yusak Adi Seiawan: "di pelajaran PPKn siswa diajarkan untuk bersikap jujur Pak".

Berdasarkan hasil wawancara berarti kontribusi mata pelajaran PPKn dalam membentuk perilaku jujur siswa SMA Negeri 19 Surabaya tergolong tinggi. Hal ini karena sekitar 15 dari 20 informan mengatakan pengaruh jujur lebih banyak diajarkan guru PPKn. Namun bukan berarti pelajaran lain seperti agama tidak memiliki kontribusi pada perilaku jujur, hanya saja kontribusi yang diberikan tidak sebesar mata pelajaran PPKn.

3. Perilaku toleransi

Hasil dari wawancara sebagai bahan pelengkap penelitian bahwasanya perilaku toleransi siswa banyak dipengaruhi oleh mata pelajaran PPKn. Rata-rata informan mengatakan bahwa perilaku toleransi siswa merupakan hasil dari pengajaran materi PPKn. Kata informan yang bernama Aditya Imam: "Toleransi banyak diajarkan mata pelajaran PPKn seperti menghormati orang beda agama yang sedang beribadah". Ini artinya

PPKn memiliki peran yang lebih dalam membentuk perilaku toleransi siswa.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kontribusi mata pelajaran PPKn dalam membentuk perilaku toleransi siswa SMA Negeri 19 Surabaya tergolong tinggi. Hal ini karena sekitar 16 siswa mengatakan pengaruh jujur lebih banyak diajarkan guru PPKn. Namun bukan berarti pelajaran lain tidak memiliki kontribusi pada perilaku toleransi, hanya saja kontribusi yang diberikan mata pelajaran dalam membentuk perilaku toleransi siswa kecil.

4. Perilaku disiplin

Hasil dari wawancara sebagai bahan pelengkap penelitian bahwasanya perilaku disiplin siswa sedikit banyak dipengaruhi oleh mata pelajaran PPKn. Rata-rata informan mengatakan bahwa perilaku disiplin siswa merupakan hasil dari pengajaran materi PPKn. Kata informan yang bernama Aldi Wahyu Firmansyah: “disiplin adalah salah satu sikap yang wajib diajarkan di PPKn”.

Berdasarkan hasil wawancara berarti kontribusi mata pelajaran PPKn dalam membentuk perilaku disiplin siswa SMA Negeri 19 Surabaya tergolong tinggi. Hal ini karena sebagian besar informan mengatakan pengaruh perilaku disiplin lebih banyak diajarkan guru PPKn. Namun bukan berarti pelajaran lain seperti Penjaskes tidak memiliki kontribusi pada perilaku disiplin, hanya saja kontribusi yang diberikan tidak sebesar mata pelajaran PPKn.

5. Perilaku kerja keras

Hasil dari wawancara sebagai bahan pelengkap penelitian bahwasanya perilaku kerja keras siswa banyak dipengaruhi oleh mata pelajaran ekonomi. Rata-rata informan mengatakan bahwa perilaku kerja keras siswa merupakan hasil dari pengajaran ekonomi untuk menjawab kebutuhan hidup. Kata informan yang bernama Ambar Sari: “Salah satu solusi mengatasi ekonomi adalah kerja keras. Dan saya lebih banyak mendapatkan perilaku tersebut pada mata pelajaran ekonomi”.

6. Perilaku kreatif

Hasil dari wawancara sebagai bahan pelengkap penelitian bahwasanya perilaku kreatif siswa sangat sedikit dipengaruhi oleh mata pelajaran PPKn. Rata-rata informan mengatakan bahwa perilaku kreatif siswa merupakan hasil dari pengajaran materi Kesenian. Kata informan yang bernama Aulia Iman: “ilmu kreatif saya karena lebih banyak membuat hasil seni”.

Berdasarkan hasil wawancara berarti kontribusi mata pelajaran PPKn dalam membentuk perilaku kreatif siswa SMA Negeri 19 Surabaya tergolong rendah. Hal ini karena sebagian besar informan mengatakan pengaruh perilaku kreatif lebih banyak diajarkan guru Kesenian.

Namun bukan berarti pelajaran PPKn tidak memiliki kontribusi pada perilaku kreatif, hanya saja kontribusi yang diberikan pelajaran PPKn relatif kecil.

7. Perilaku mandiri

Hasil dari wawancara sebagai bahan pelengkap penelitian bahwasanya perilaku mandiri siswa sangat sedikit dipengaruhi oleh mata pelajaran Bimbingan Konseling (BK). Rata-rata informan mengatakan bahwa perilaku mandiri siswa merupakan hasil dari pengajaran materi BK. Kata informan yang bernama Bima: “kemandirian seseorang banyak saya dapatkan dari cerita-cerita guru BK saat mengajar di kelas”.

Berdasarkan hasil wawancara berarti kontribusi mata pelajaran PPKn dalam membentuk perilaku mandiri siswa SMA Negeri 19 Surabaya tergolong rendah. Hal ini karena sebagian besar informan mengatakan pengaruh perilaku mandiri lebih banyak diajarkan guru BK. Namun bukan berarti pelajaran PPKn tidak memiliki kontribusi pada perilaku mandiri, hanya saja kontribusi yang diberikan pelajaran PPKn relatif kecil.

8. Perilaku demokratis

Hasil dari wawancara sebagai bahan pelengkap penelitian bahwasanya perilaku demokratis siswa banyak dipengaruhi oleh mata pelajaran PPKn. Rata-rata informan mengatakan bahwa perilaku demokratis siswa merupakan hasil dari implementasi materi PPKn. Kata informan yang bernama Arindra Wulan: “demokrasi selalu diterapkan dalam kelas saya seperti pemilihan ketua kelas sebagaimana di ajarkan dalam pelajaran PPKn”.

Berdasarkan hasil wawancara berarti kontribusi mata pelajaran PPKn dalam membentuk perilaku demokratis siswa SMA Negeri 19 Surabaya tergolong tinggi. Hal ini karena 13 informan mengatakan pengaruh perilaku demokratis lebih banyak diajarkan guru PPKn.

9. Perilaku rasa ingin tahu

Hasil dari wawancara sebagai bahan pelengkap penelitian bahwasanya perilaku rasa ingin tahu siswa sangat sedikit dipengaruhi oleh mata pelajaran PPKn. Rata-rata informan mengatakan bahwa perilaku rasa ingin tahu siswa merupakan hasil dari pengajaran materi Bahasa Indonesia. Kata informan yang bernama Karimah: “saat membaca cerita sering mengalami kejadian tidak faham jadi saya seting bertanya keingintahuan saya Pak.”

Berdasarkan hasil wawancara berarti kontribusi mata pelajaran PPKn dalam membentuk perilaku rasa ingin tahu siswa SMA Negeri 19 Surabaya tergolong rendah. Hal ini karena sebagian besar informan mengatakan pengaruh perilaku rasa ingin tahu lebih banyak diajarkan guru Bahasa Indonesia. Namun bukan berarti pelajaran PPKn tidak memiliki kontribusi pada

perilaku rasa ingin tahu, hanya saja kontribusi yang diberikan pelajaran PPKn relatif kecil.

10. Perilaku semangat kebangsaan

Hasil dari wawancara sebagai bahan pelengkap penelitian bahwasanya perilaku semangat kebangsaan siswa banyak dipengaruhi oleh mata pelajaran PPKn. Sebagian besar informan mengatakan bahwa perilaku semangat kebangsaan siswa merupakan hasil dari pengajaran materi PPKn. Kata informan yang bernama Briliyan Dinda: "Semangat kebangsaan saya adalah buah hasil dari pelajaran PPKn". Selanjutnya ditanya alasan apa yang melatarbelakangi pernyataan informan tersebut. Informan mengatakan bahwa sikap yang dimilikinya lebih menunjukkan sikap yang baik seperti lebih banyak hafal lagu-lagu nasional.

Berdasarkan hasil wawancara berartinya kontribusi mata pelajaran PPKn dalam membentuk perilaku demokratis siswa SMA Negeri 19 Surabaya tergolong tinggi. Hal ini karena lebih dari 13 informan mengatakan pengaruh perilaku demokratis lebih banyak diajarkan guru PPKn.

11. Perilaku cinta tanah air

Hasil dari wawancara sebagai bahan pelengkap penelitian bahwasanya perilaku cinta tanah air siswa banyak dipengaruhi oleh mata pelajaran PPKn. Sebagian besar informan mengatakan bahwa perilaku cinta tanah air siswa merupakan hasil dari pengajaran materi PPKn. Kata informan yang bernama Nur Kholifah: "Saya selalu mengikuti upacara bendera merah putih tiap 2 minggu sekali adalah salah satu bukti saya bahwa saya mencintai tanah air sebagaimana diajarkan oleh guru PPKn".

Berdasarkan hasil wawancara berartinya kontribusi mata pelajaran PPKn dalam membentuk perilaku cinta tanah air siswa SMA Negeri 19 Surabaya tergolong tinggi. Hal ini karena sebagian besar informan mengatakan pengaruh perilaku cinta tanah air lebih banyak diajarkan guru PPKn. Namun bukan berarti pelajaran lain tidak memiliki kontribusi pada perilaku cinta tanah air, hanya saja kontribusi yang diberikan tidak sebesar mata pelajaran PPKn.

12. Perilaku menghargai prestasi

Hasil dari wawancara sebagai bahan pelengkap penelitian bahwasanya perilaku menghargai prestasi siswa sangat sedikit dipengaruhi oleh mata pelajaran PPKn. Rata-rata informan mengatakan bahwa perilaku menghargai prestasi siswa merupakan hasil dari pengajaran materi PenjasKes. Kata informan yang bernama Fajar Gilang: "olahragalah yang sering memperoleh prestasi Pak." Jadi sikap saya banyak dipengaruhi oleh PenjasKes.

Berdasarkan hasil wawancara berarti kontribusi mata pelajaran PPKn dalam membentuk perilaku menghargai prestasi siswa SMA Negeri 19 Surabaya

tergolong rendah. Hal ini karena sebagian besar informan mengatakan pengaruh perilaku menghargai prestasi lebih banyak diajarkan guru Bahasa Indonesia. Namun bukan berarti pelajaran PPKn tidak memiliki kontribusi pada perilaku menghargai prestasi, hanya saja kontribusi yang diberikan pelajaran PPKn relatif kecil.

13. Perilaku bersahabat/komunikatif

Hasil dari wawancara sebagai bahan pelengkap penelitian bahwasanya perilaku bersahabat/komunikatif siswa sangat sedikit dipengaruhi oleh mata pelajaran Bimbingan Konseling (BK). Rata-rata informan mengatakan bahwa perilaku bersahabat/komunikatif siswa merupakan hasil dari pengajaran materi BK. Kata informan yang bernama Cahyani: "Perilaku bersahabat/komunikatif saya peroleh dari pelajaran BK Mas". Hal ini karena guru BK mengajarkan untuk pandai bergaul dengan orang di sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara berartinya kontribusi mata pelajaran PPKn dalam membentuk perilaku bersahabat/komunikatif siswa SMA Negeri 19 Surabaya tergolong rendah. Hal ini karena sebagian besar informan mengatakan pengaruh perilaku bersahabat/komunikatif lebih banyak diajarkan guru BK. Namun bukan berarti pelajaran PPKn tidak memiliki kontribusi pada perilaku bersahabat/komunikatif, hanya saja kontribusi yang diberikan pelajaran PPKn relatif kecil.

14. Perilaku cinta damai

Hasil dari wawancara sebagai bahan pelengkap penelitian bahwasanya perilaku cinta damai siswa banyak dipengaruhi oleh mata pelajaran PPKn. Sebagian besar informan mengatakan bahwa perilaku cinta damai siswa merupakan hasil dari pengajaran materi PPKn. Kata informan yang bernama Dian Andrianto: "cinta damai yang saya terapkan pada kehidupan sehari-hari saya berasal dari pengajaran guru PPKn di kelas". Selanjutnya ditanya alasan apa yang melatarbelakangi pernyataan informan tersebut. Informan mengatakan bahwa sikap yang dimilikinya lebih menunjukkan sikap yang baik untuk ditujukan ke semua orang yang ada di sekitarnya.

Berdasarkan hasil wawancara berartinya kontribusi mata pelajaran PPKn dalam membentuk perilaku cinta damai siswa SMA Negeri 19 Surabaya tergolong tinggi. Hal ini karena 15 lebih informan mengatakan pengaruh perilaku cinta damai lebih banyak diajarkan guru PPKn di sekolah.

15. Perilaku gemar membaca

Hasil dari wawancara sebagai bahan pelengkap penelitian bahwasanya perilaku gemar membaca siswa sangat sedikit dipengaruhi oleh mata pelajaran PPKn. Rata-rata informan mengatakan bahwa perilaku gemar membaca siswa merupakan hasil dari pengajaran materi Bahasa Indonesia. Kata informan yang bernama Aulia Iman juga mengatakkn: "Tugas bahasa Indonesia sering

membaca, jadi perilaku saya lebih baik karena pelajaran Bahasa Indonesia”.

Berdasarkan hasil wawancara berarti kontribusi mata pelajaran PPKn dalam membentuk perilaku gemar membaca siswa SMA Negeri 19 Surabaya tergolong rendah. Hal ini karena sebagian besar informan mengatakan pengaruh perilaku gemar membaca lebih banyak diajarkan guru Bahasa Indonesia. Namun bukan berarti pelajaran PPKn tidak memiliki kontribusi pada perilaku gemar membaca, hanya saja kontribusi yang diberikan pelajaran PPKn relatif kecil.

16. Perilaku peduli lingkungan

Hasil dari wawancara sebagai bahan pelengkap penelitian bahwasanya perilaku peduli lingkungan siswa sangat sedikit dipengaruhi oleh mata pelajaran PPKn. Rata-rata informan mengatakan bahwa perilaku peduli lingkungan siswa merupakan hasil dari pengajaran materi Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH). Kata informan yang bernama Ach. Abdullah: “sikap peduli lingkunganku lebih dipengaruhi oleh PLH Mas”.

Berdasarkan hasil wawancara berarti kontribusi mata pelajaran PPKn dalam membentuk perilaku peduli lingkungan siswa SMA Negeri 19 Surabaya tergolong rendah. Hal ini karena sebagian besar informan mengatakan pengaruh perilaku peduli lingkungan lebih banyak diajarkan guru PLH. Namun bukan berarti pelajaran PPKn tidak memiliki kontribusi pada perilaku peduli lingkungan, hanya saja kontribusi yang diberikan pelajaran PPKn relatif kecil.

17. Perilaku peduli sosial

Hasil dari wawancara sebagai bahan pelengkap penelitian bahwasanya perilaku peduli sosial siswa sangat sedikit dipengaruhi oleh mata pelajaran Bimbingan Konseling (BK). Rata-rata informan mengatakan bahwa perilaku peduli sosial siswa merupakan hasil dari pengajaran materi BK. Kata informan yang bernama Ami: “Perilaku sosial saya berasal dari pelajaran BK Pak”. Hal ini karena guru BK mengajarkan manusia adalah makhluk sosial.

Berdasarkan hasil wawancara berarti kontribusi mata pelajaran PPKn dalam membentuk perilaku peduli sosial siswa SMA Negeri 19 Surabaya tergolong rendah. Hal ini karena sebagian besar informan mengatakan pengaruh perilaku peduli sosial lebih banyak diajarkan guru BK. Namun bukan berarti pelajaran PPKn tidak memiliki kontribusi pada perilaku peduli sosial, hanya saja kontribusi yang diberikan pelajaran PPKn relatif kecil.

18. Perilaku tanggung jawab

Hasil dari wawancara sebagai bahan pelengkap penelitian bahwasanya perilaku tanggung jawab siswa banyak dipengaruhi oleh mata pelajaran PPKn. Sebagian besar informan mengatakan bahwa perilaku tanggung

jawab siswa merupakan hasil dari pengajaran materi PPKn. Kata informan yang bernama Agil Genius dan Fatah mengatakan bahwa tanggung jawab yang saya terapkan pada kehidupan sehari-hari saya berasal dari pengajaran guru PPKn di kelas. Selanjutnya ditanya alasan apa yang melatarbelakangi pernyataan informan tersebut. Informan mengatakan bahwa sikap yang dimilikinya lebih menunjukkan sikap yang baik untuk ditunjukkan ke semua orang yang ada di sekitarnya.

Berdasarkan hasil wawancara berarti kontribusi mata pelajaran PPKn dalam membentuk perilaku tanggung jawab siswa SMA Negeri 19 Surabaya tergolong tinggi. Hal ini karena 15 lebih informan mengatakan pengaruh perilaku tanggung jawab lebih banyak diajarkan guru PPKn di sekolah dari pada pelajaran lainnya.

Analisis Perilaku Berdasarkan Konsep

Selanjutnya berdasarkan konsep dan teori belajar menurut Pengkondisian operan (kondisioning operan) oleh Skinner. Pengkondisian operan adalah suatu bentuk pembelajaran dimana konsekuensi-konsekuensi dari perilaku menghasilkan perubahan dalam probabilitas perilaku itu akan diulangi. Pengulangan dan pelatihan digunakan supaya perilaku yang diinginkan dapat menjadi kebiasaan. Hasil yang diharapkan dari penerapan teori behavioristik ini adalah terbentuknya suatu perilaku yang diinginkan. Perilaku yang diinginkan mendapat penguatan positif dan perilaku yang kurang sesuai mendapat penguatan negatif.

Hal di atas dapat diartikan perilaku yang ditunjukkan oleh siswa merupakan salah satu dari hasil dari pembelajaran mata pelajaran PPKn di sekolah. Oleh karena itu PPKn memiliki kontribusi yang lebih dalam membentuk perilaku siswa melalui kebiasaan dalam pengajaran di sekolah. Tidak hanya itu melalui pengkondisian operan perubahan perilaku juga dapat diamati sebagai pedoman guru dalam memberi penilaian terhadap perilaku siswa.

Sedangkan 6 asumsi yang dijelaskan oleh Gredler dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Perilaku juga merupakan pelajaran yang harus diberikan oleh guru PPKn selain mengajarkan wawasan ilmu pengetahuan tentang Pancasila dan kewarganegaraan. Hal ini dikarenakan bahwa belajar itu merupakan perilaku yang ditunjukkan oleh siswa terhadap pembelajaran guru PPKn
2. Lingkungan tempat belajar juga dapat mempengaruhi perilaku siswa, dalam hal ini adalah sekolah serta organ didalamnya, termasuk, guru, karyawan, tukang kebun, kepala sekolah, dan penjaga kantin wilayah sekolah SMAN 19 Surabaya.

3. Hubungan antara perilaku dan lingkungan dapat diamati dengan perubahan perilaku yang tampak dan dapat dirasakan oleh panca indra manusia. Oleh karena itu perilaku tidak dapat dipisahkan oleh lingkungan yang dapat membentuk perilaku siswa.
4. Perilaku awal siswa dapat dijadikan sebagai tolak ukur sumber informasi atas perubahan yang terjadi antara perilaku akir yang berubah dengan lingkungan yang ada di SMAN 19 Surabaya.
5. Pada hakikatnya perilaku yang ditunjukkan oleh siswa SMAN 19 Surabaya adalah murni dari dalam dirinya sendiri secara individual. Dimana perilaku tersebut merupakan sumber data yang bisa dijadikan sebagai pedoman penyebab berubahnya perilaku siswa.
6. Secara tidak langsung proses hubungan antara siswa dan sekolah merupakan dinamika interaksi manusia dengan lingkungannya. Dan hubungan tersebut tidak hanya terjadi pada manusia tetapi pada makhluk hidup lainnya.

Jika mengacu pada perilaku religius siswa, maka perilaku ini memiliki kriteria paling bawah diantara perilaku lainnya. Hal ini bisa saja disebabkan karena perilaku religius tersebut lebih dipengaruhi oleh pendidikan agama disekolah SMAN 19 Surabaya. Namun apabila melihat perilaku yang memiliki kriteria sangat tinggi seperti cinta damai, ini berarti peran dari PPKn terhadap perilaku tersebut yaitu mengenai sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya adalah sangat besar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Kontribusi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam membentuk perilaku gemar membaca, religius dan peduli sosial masih rendah yaitu dengan persentase antara 40,49% sampai dengan 46,47%.
2. Kontribusi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam membentuk perilaku perilaku mandiri, peduli lingkungan, kreatif, rasa ingin tahu, jujur, cinta tanah air, menghargai prestasi, tanggung jawab, disiplinkerja keras, bersahabat/komunikatif sudah cukup yaitu dengan persentase antara 47,49% sampai dengan 63,63%.
3. Kontribusi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam membentuk perilaku perilaku toleransi, cinta damai, semangat kebangsaan, demokrasi dalam kategori tinggi yaitu

dengan persentase antara 72,50% sampai dengan 79,35%.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat disederhanakan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.

Kontribusi mata pelajaran PPKn dalam membentuk perilaku siswa di SMA Negeri 19 Surabaya

No.	Perilaku Siswa	Kriteria		
		Tinggi	Cukup	Rendah
1	Religius			√
2	Jujur		√	
3	Toleransi	√		
4	Disiplin		√	
5	Kerja Keras		√	
6	Kreatif		√	
7	Mandiri		√	
8	Demokratis	√		
9	Rasa Ingin Tahu		√	
10	Semangat Kebangsaan	√		
11	Cinta Tanah Air		√	
12	Menghargai Prestasi		√	
13	Bersahabat/Komunikatif		√	
14	Cinta Damai	√		
15	Gemar Membaca			√
16	Peduli Lingkungan		√	
17	Peduli Sosial			√
18	Tanggung Jawab		√	

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disarankan kepada para siswa terutama siswa SMAN 19 Surabaya untuk tetap mempertahankan perilaku baik yang dimiliki atas kontribusi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah diberikan guru di sekolah. Dan diharapkan untuk meningkatkan perilaku yang masih dalam kriteria cukup. Hal ini dikarenakan siswalah yang akan menjadi generasi penerus bangsa selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2009. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta
 _____ . 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta

- Dewey, John. 1915. *Democracy And Education, an introduction of the filosophy of education*. Jurnal Ilmiah. Diakses tanggal 21 Januari 2014
- Hamalik, Oemar. 2011. *Dasar-Dasar Pengembangan kurikulum*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Idi, Abdullah. 2011. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media
- Jasin, Anwar. 1987. *Pembaharuan Kurikulum Sekolah Dasarsejak Proklamasi Kemerdekaan*._____
- John W. Satrock, 2007. *Psikologi Pendidikan*.edisi kedua. Jakarta:PT Kencana Media Group
- Kaelan.2010. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Manasse Malo dan Sri Trisnoningtias. 1986. *Metode Penelitian Masyarakat*, Pusat Antar Universitas Ilmu Ilmu Sosial Universitas Indonesia. Jakarta: hal 28
- Margaret E. Bell Gredler, 1994.*Belajar dan pembelajaran*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Margono. 2007. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Marsudi, Subandi Al. 2001. *Pancasila dan UUD'45 dalam Paradigma Reformasi*.Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Nasution. 2009. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nursalim, Mochamad, dkk. 2007. *Psikologi Pendidikan*. Surabaya: Unesa University Press.
- Syarbaini, Syahrial, dkk. 2006. *Membangun Karakter dan Kepribadian melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta : UIEU – University Press
- Sugiyono,. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Zuriah, Nurul. 2008. *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Zamroni dalam International Conference on Chemistery Education (ICCE 2003). Jurnal Ilmiah. Diakses 5 Februari 2014
- Undang Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Sumber dari Internet :**
- Arkadiuswellyam. 2012. *Pengertian dan Contoh dari Tiap Sila Pancasila*.<http://arkadiuswellyam.wordpress.com/2012/12/10/pengertian-dan-contoh-dari-tiap-sila-Pancasila/>. Diakses 17 November 2013
- Cyber, Bromo. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan*. <http://bromocyber.azisgr.com/2010/05/pendidikan-kewarganegaraan-pkn.html>. Diakses 17 November 2013
- Evanbastian.2013. *Jasa Ki Hajar Dewantara Bagi Pendidikan Indonesia*.<http://forum.viva.co.id/tokoh/>. Diakses 16 November 2013
- Kumpulan ilmu – ilmu.2013.*Pengertian dan Defenisi Pendidikan Menurut Para Ahli*.<http://kumpulaniilmu2.blogspot.com/2013/03/pengertian-dan-definisi-pendidikan.html>.Diakses 15 November 2013
- SEO Education.2010.*Pengertian Pendidikan Menurut Para Ahli*.<http://zonependidikan.blogspot.com/2010/05/pengertian-pendidikan-menurut-para-ahli.html>. Diakses 16 November 2013
- Setiawan, Ebta. 2010. *KBBI Offline*. <http://pusatbahasa.kemendiknas.go.id/kbbi/>. Diakses 14 November 2013.
- <http://hamiddarmadi.blogspot.com/2013/07/urgensi-pendidikan-pancasila-dan.html>. Diakses 20 Januari 2014
- <http://raharjo.wordpress.com/2009/11/10/276/>Diakses 20 Januari 2014
- <http://tabloid-mh.blogspot.com/2011/08/tujuan-dan-fungsi-pendidikan.html>. Diakses 20 Januari 2014

Sumber dari Perundang-undangan :

- Undang Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional